



Tiga OPD Kecipratan 81 Miliar

◆ Silangen: Melalui Pergeseran, Penanganan Covid-19

EDITOR: TANYA ROMPAS
PELIPUT: BALLADEWA SETLIGHT

MANADO—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), terus melakukan upaya pencegahan penyebaran serta penanganan pandemi Covid-19. Anggaran penanganan Covid-19 juga telah disiapkan Pemprov Sulut.

Disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen, pergeseran anggaran telah selesai dilakukan. Dari pergeseran anggaran tersebut, Pemprov Sulut mengalokasikan 81,3 miliar untuk penanganan Covid-19.

"Pemprov Sulut telah melakukan pergeseran anggaran sebesar 81,3 miliar yang dibagi kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Kesehatan yang menangani kasus Covid-19. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial yang berkaitan dengan social safety net," tuturnya.

Silangen mengatakan, pergeseran anggaran yang dilakukan tersebut sudah mengantongi persetujuan pemerintah pusat. Serta pergeseran anggaran

yang dilakukan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, Mendagri dan Menteri Keuangan RI yang berkaitan dengan refocusing anggaran.

"Kita mempunyai masyarakat miskin sebanyak 191 ribu yang disimulasikan dengan presentasi masyarakat miskin dan rakyat yang mengalami dampak dari Covid-19 ini. Sehingga alokasi anggaran yang kita butuhkan ini memang harus presisi dan juga sesuai dengan arahan pemerintah pusat," ungkapnya.

Silangen menjelaskan, upaya pemprov memperhatikan dampak sosial ekonomi dari Covid-19 dengan menjaga ketersediaan stok pangan. "Bahan pokok masyarakat ini harus dapat tercukupi, kita punya ketahanan pangan bahan po-

kok ini khususnya beras yang menjadi konsumsi masyarakat di Sulut ini dilaporkan 3 bulan untuk ketahanan bahan pokok beras, sudah bekerjasama dengan pihak Bulog agar dapat melakukan operasi pasar jika terjadi kekurangan stok di pasar," imbuhnya.

Terkait imbauan menunda mudik pada Lebaran 2020, Silangen menjelaskan bahwa gubernur telah menginstruksikan kepada bupati/wali kota agar dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik. "Ini juga didukung oleh BKSAUA dan FKUB yang ada di Sulut. Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada pimpinan agama yang dilakukan secara langsung oleh pak gubernur, bahkan masyarakat di Sulut sudah menjalankan ibadah di rumah masing-masing sejak 2 minggu yang lalu," terangnya.

Sementara itu, dalam video conference dengan keketarar daerah dan sejumlah bupati/wali kota se-Indonesia. Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik menyampaikan, kebijakan yang telah diambil pemerintah antara lain mengeluarkan PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden 11/2020 tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Terkait dengan refocusing anggaran, daerah dapat melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBD masing-masing. Menanggulangi pandemi covid-19 ini, diperlukan sinergi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita juga mengimbau agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan forkopimda, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudik," pungkasnya. (***)



KOORDINASI: Sekprov Sulut Edwin Silangen saat melakukan video conference dengan Kementerian Dalam Negeri. DOK HUMAS